



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)
KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2023**



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 203 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

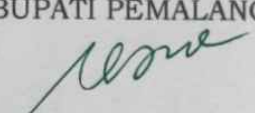
NOMOR , : 050/ 203 /TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Bantarbolang	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Bantarbolang	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
7.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
9.	Bendahara Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Fatchur Roji
10.	Pranata Laporan Keuangan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Widyaningsih, A. Md.
11.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Nur Solekhah, S.E.
12.	Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Wamrohatun
13.	Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Zaenal Impron
14.	Pengadministrasi Kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Wahyu Tri Anggono
15.	Petugas Keamanan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Ahmad Nasoha

BUPATI PEMALANG,


MUKTI AGUNG WIBOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**

**KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 050/ /TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**

CAMAT BANTARBOLANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bantarbolang perlu membentuk Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang;
35. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
36. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
37. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang;
39. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pematang;
40. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022;
41. Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah:
- mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan dalam penyusunan Renja PD;
 - melakukan penyusunan Renja PD;
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim sebagai bahan masukan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Penyusun Renja PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Bantarbolang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantarbolang
pada tanggal Agustus 2022



TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Bupati Pemalang;
 - Kepala BKAD Kab. Pemalang;
 - Kepala Bappeda Kab. Pemalang;
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang;
 - Anggota Tim yang bersangkutan;
 - Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
NOMOR : 050/ /TAHUN 2022
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Bantarbolang	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan Bantarbolang	Sekretaris	
3	Kepala Sub Bagian Bina Program Dan Keuangan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
6	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
7	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	
9	Bendahara Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Fatchur Roji
10	Pranata Laporan Keuangan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Widyaningsih, A. Md
11	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Nur Solekhah, S.E.
12	Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Wamrohatun
13	Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Zaenal Impron
14	Pengadministrasi Kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Wahyu Tri Anggono
15	Petugas Keamanan pada Kecamatan Bantarbolang	Anggota	Ahmad Nasoha

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CAMAT BANTARBOLANG
KACAMATAN BANTARBOLANG
WALUYO, S.STP, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19771230 199703 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**

**KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 050/ 35 /TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**

CAMAT BANTARBOLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang;
32. Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang;
33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
35. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
36. Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang;
37. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pematang;
38. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022;
39. Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN CAMAT BANTARBOLANG TENTANG RENCANA KEJA KECAMATAN BANTARBOLANG TAHUN 2023**

Pasal 1

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bantarbolang yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2022, merupakan bagian dari Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 dan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2023).

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Bantarbolang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarbolang
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bantarbolang

BAB V : Penutup

- 5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pasal 3

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan menjadi bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.

Pasal 4

Peraturan Camat Bantarbolang Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantarbolang

pada tanggal : Agustus 2022




TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang;
 2. Kepala BKAD Kab. Pemalang;
 3. Kepala Bappeda Kab. Pemalang;
 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan;
 6. A r s i p.
-

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bantarbolang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, Agustus 2022
CAMAT BANTARBOLANG

WALIYO, S.STP, MP.
Pembina Tk. I
NIP. 19771230 199703 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023. Renja Kecamatan Bantarbolang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bantarbolang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Bantarbolang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2023. Renja Kecamatan Bantarbolang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Bantarbolang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Bantarbolang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Bantarbolang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Bantarbolang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

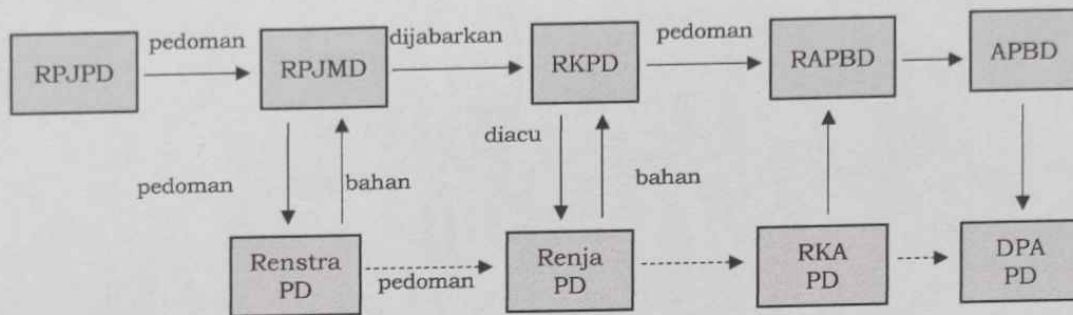
1. Persiapan penyusunan :
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2021, pengendalian kegiatan tahun 2021, dan RKPD tahun 2023)
2. Penyusunan rancangan awal :
 - Koordinasi dengan Seksi-seksi
 - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan :
 - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Bantarbolang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah :
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir :
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023
 - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan :
 - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang
Tahun 2023



Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Bantarbolang tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2023 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Bantarbolang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang tahun 2023, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang;
30. Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang;
31. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
32. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang;

35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2023 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Bantarbolang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Bantarbolang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Bantarbolang tahun 2023;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 mengacu pada APBD Tahun 2022, Pencapaian target Renstra Kecamatan Bantarbolang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang, program, kegiatan dan sub kegiatan.

4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bantarbolang, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Bantarbolang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Bantarbolang pada tahun 2021 dan estimasi tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2021

Jumlah anggaran Kecamatan Bantarbolang sebesar Rp.3.447.892.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 2.771.805.157,00 atau sebesar 95,60%.

Tahun Anggaran 2022 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Bantarbolang sebesar Rp.2.758.285.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 17 kegiatan dan 58 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II (dua), anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp.1.236.361.086,00 atau sebesar 44,83%

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, Kecamatan Bantarbolang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan dengan adanya pandemi Covid 19 membatasi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan juga membatasi rapat koordinasi ke luar daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, Kecamatan Bantarbolang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 2 Program, 5 Kegiatan dan 5 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Ada 4 Program, 6 Kegiatan dan 35 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Ada 0 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi sehingga sebagian besar kegiatan terpenuhi
 - b. Sub kegiatan yang tidak terpenuhi karena adanya covid 19 dan kebijakan refofusing anggaran
 - c. SDM belum cukup mendukung pencapaian target
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bantarbolang yaitu (tercapai/~~tidak tercapai~~) di tahun 2021;
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;

- b. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bantarbolang;
- c. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP ;
- d. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
- e. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pematang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bantarbolang s/d Tahun 2022 Kabupaten Pematang

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5 \times 100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4 \times 100\%)$
7	Unsur Kewilayahan								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansai Pemerintah	55 skor	46,89 skor			46,89 skor	-	
		Indeks Reformasi Birokrasi	16 indeks	11 indeks	11 indeks		11,72 skor	-	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen	11 dokumen	92,00%	12 dokumen	4 dokumen	33,33%
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan,	100%	100%	100%	100%	100 %	33,33%	33,33%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5 \times 100\%)$	8	$9 = (6+8)$	$10 = (9/4 \times 100\%)$
		penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	3 dokumen	1 dokumen	33,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4*100\%)$
		SKPD yang tersusun							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	-	-	0	3 dokumen	1 dokumen	33,33%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	14 dokumen	14 dokumen	7 dokumen	50,00%	14 dokumen	5 dokumen	35,71%
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	36,00%	36,00%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	17 Orang/ 14 bulan	17 orang/14 bulan	17 orang/9 bulan	65,00%	17 orang/14 bulan	17 orang/7 bulan	50,00%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5 \times 100\%)$	8	$9 = (6+8)$	$10 = (9/4 \times 100\%)$
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	11 dokumen	18 dokumen	11 dokumen	62,00%	11 dokumen	4 dokumen	36,36%
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0	0
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	2 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai	100%	0	0	0	100%	100%	100,00%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4*100\%)$
		ketentuan							
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBUD) yang tersusun	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	20 orang	20 orang	20 orang	100,00%	20 orang	10 orang	50,00%
	Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkatkan kapasitasnya	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-	20 orang/1 kegiatan	20 orang/1 kegiatan	20 orang/1 kegiatan	100,00%	20 orang/1 kegiatan	5 orang/1 kegiatan	25,00%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		undangan							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang/ 1 kegiatan	20 orang/1 kegiatan	20 orang/ 1 kegiatan	100,00%	20 orang/1 kegiatan	5 orang/1 kegiatan	25,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100,00%	5 layanan	10 layanan	200%
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum yang diperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100,00%	100%	152%	152%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis/ 12 bulan	11 jenis/ 12 bulan	11 jenis/ 12 bulan	100,00%	11 jenis/ 12 bulan	7 jenis/ 6 bulan	63,63%
	Penyediaan Peralatan	Jumlah	5 unit	0	0	0	5 unit	4 unit	80,00%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5 * 100\%)$	8	$9 = (6+8)$	$10 = (9/4 * 100\%)$
	dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	0	0	0	5 unit	0	0
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 12 bulan	100,00%	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 6 bulan	50,00%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 12 bulan	100,00%	3 jenis/ 12 bulan	2 jenis/3 bulan	66,66%
		Jumlah penggandaan yang tersedia	29.630 lembar	14.056 lembar	0	0	29.630 lembar	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 buku	10 buku	10 buku	100,00%	0	0	0
		Jenis surat kabar yang tersedia	2 jenis/ 12 bulan	2 jenis/ 12 bulan	2 jenis/ 12 bulan	100,00%	1 jenis/ 12 bulan	1 jenis/ 6 bulan	50,00%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	2 jenis/ 240 kegiatan	240 jenis	252 jenis	105,00%	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah								

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5 \times 100\%)$	8	$9 = (6+8)$	$10 = (9/4 \times 100\%)$
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	16 unit	4 unit	2 unit	50,00%	18 unit	0	0
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100,00%	100%	0	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dibeli	-	2 unit	0	0	0	0	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	10 unit	0	0	0	10 unit	0	0
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 unit	2 unit	2 unit	100,00%	5 unit	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang	3 jasa	3 jasa	3 jasa	100,00%	3 jasa	5 jasa	166,66%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		urusan pemerintahan daerah yang tersedia							
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100,00%	100%	167%	167%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas	1000 surat	1000 surat	600 surat	60,00%	1000 surat	500 surat	50,00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rekening/ 12 bulan	3 rekening/ 12 bulan	3 rekening/ 12 bulan	100,00%	3 rekening/ 12 bulan	3 rekening/ 6 bulan	50,00%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor/penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	17 orang/ 12 bulan	16 orang/ 12 bulan	14 orang/ 12 bulan	87,50%	17 orang/ 12 bulan	17 orang/6 bulan	50,00%
	Pemelibarsan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang	68 unit	46 unit	43 unit	93,47%	68 unit	41 unit	60,29%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5) \times 100\%$	8	9=(8/4)	10=(9/4) * 100%
	Hasil Kegiatan	milik daerah yang terpelihara Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100,00%	100%	81 %	81,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	10 unit	10 unit	10 unit	100,00%	10 unit	6 unit	60,00%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	20 unit	0	0	0	20 unit	9 unit	45,00%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	32 unit	32 unit	32 unit	100,00%	32 unit	32 unit	68,75%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 unit	3 unit	1 unit	33,33%	3 unit	2 unit	66,66%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	0	0	0	1 unit	1 unit	100,00%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4*100\%)$
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	92,22%	92,22%	63,95%	69,34%	92,22%	91,06%	98,74%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Keluaran Kegiatan	Jenis data pemerintah yang dipublikasi	1 data	1 data	1 data	100,00%	1 data	1 data	100%
	Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintah yang dipublikasi	80%	80%	80%	100,00%	80%	100%	128%
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tertutakhirkan	1 data	1 data	1 data	100,00%	1 data	1 data	100,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan								

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4*100\%)$
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 kasus	0	0	0	12 kasus	4 kasus	33,33%
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	0	0	0	100%	117%	117%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yan	35 peraturan	0	0	0	35 peraturan	18 peraturan	51,42%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	10 layanan	0	0	0	10 layanan	5 layanan	50,00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	4 kasus	0	0	0	4 kasus	4 kasus	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada								

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4*100\%)$
	Camat								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	23 kewenangan	2 kewenangan	1 kewenangan	50,00%	23 kewenangan	13 kewenangan	56,52%
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	76,67%	76,67%	76,67%	100,00%	76,67%	57,00%	74,34%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	650 izin	650 izin	342 izin	52,61%	50 izin	13 izin	2,00%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	17 dokumen 800 surat	17 dokumen	17 dokumen	100,00%	17 dokumen 800 surat	0 0	0 0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang	92%	91%	51%	56,04%	92%	52%	56,32%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4*100\%)$
		aktif							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)	120 orang	120 orang	122 orang	101,66%	120 orang	124 orang	103,33%
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran Musrenbang desa dan musrenbang kecamatan	100%	100%	100%	100,00%	100%	103,3%	103,3%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi musrenbang desa	60 orang	0	0	0	60 orang	30 orang	50,00%
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	120 orang	120 orang	120 orang	100,00%	120 orang	94 orang	78,33%
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat	1 lembaga	0	0	0	1 lembaga	0	0

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
	masyarakat di wilayah kecamatan	kecamatan yang difasilitasi							
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00%	1 lembaga	0	0
	Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%	16,67%	0	0
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	30 orang	0	0	0	30 orang	0	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100,00%	100%	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan								

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	34 orang	34 orang	34 orang	100,00%	34 orang	0	0
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	100,00%	100%	0	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	34 orang	34 orang	34 orang	100,00%	34 orang	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda/Perbup yang dikordinasikan penegakannya	5 peraturan	0	0	0	5 peraturan	0	0

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5 \times 100\%)$	8	$9 = (6+8)$	$10 = (9/4 \times 100\%)$
	Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	80%	0	0	0	80%	0	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda/Perbup yang dimonitoring	5 peraturan	0	0	0	5 peraturan	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	100%	95,63%	95,63%	100%	70%	70,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik								

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5 \cdot 100\%)$	8	$9=(6+8)$	$10=(9/4 \cdot 100\%)$
	Sosial								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 orang	4 orang	3 orang	75,00%	130 orang	35 orang	70,00%
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	100%	100%	100,00%	100%	70%	70,00%
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00%	2 dokumen	0	0

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5 * 100\%)$	8	9 = (6+8)	10 = (9/4 * 100%)
Indonesia									
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	50 orang	0	0	0	50 orang	35 orang	70,00%
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	4 kasus	0	0	0	4 kasus	2 kasus	50,00%
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah unsur Forkompincam yang berkoordinasi	3 unsur/ 12 keg	3 unsur/ 12 keg	3 unsur/ 12 keg	100,00%	3 unsur/ 12 keg	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,24%	88,24%	87,92%	99,63%	88,24%	150%	169,99%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	10 desa	10 desa	10 desa	100,00%	10 desa	10 desa	100,00%

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	100,00%	100%	150%	150,00%
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	17 desa/ 7 kegiatan	17 desa/ 7 kegiatan	17 desa/ 7 kegiatan	100,00%	17 desa/ 7 kegiatan	10 desa/ 3 kegiatan	58,82%
58,82%	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	17 desa/ 1 kegiatan	17 desa/ 1 kegiatan	17 desa/ 1 kegiatan	100,00%	17 desa/ 1 kegiatan	0	0
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17 desa/ 1 kegiatan	17 desa/ 1 kegiatan	17 desa/ 1 kegiatan	100,00%	17 desa/ 1 kegiatan	0	0
	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 orang/ 1 kegiatan	17 orang/ 1 kegiatan	0	0	17 orang/ 1 kegiatan	0	0

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/5 \times 100\%)$	8	$9 = (6+8)$	$10 = (9/4 \times 100\%)$
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	85 orang/ 1 kegiatan	85 orang/ 1 kegiatan	0	0	85 orang/ 1 keg	0	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	17 desa/ 1 kegiatan	0	0	0	10 surat	0	0
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	17 desa/ 1 kegiatan	17 desa/ 1 kegiatan	17 desa/ 1 kegiatan	100,00%	17 desa/ 1 kegiatan	0	0
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	51 desa/ 1 kegiatan	51 desa/ 1 kegiatan	51 desa/ 1 kegiatan	100,00%	51 desa/ 1 kegiatan	0	0

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 dan 2022 serta proyeksi Tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		99,73		78	80	82	84	81,56	78	82	84	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		96,47		94,29	94,49	94,69	96,07	96,32	62,61	94,69	96,07	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				10,72	11,72	12,72	13,72	11	0	12,72	13,72	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				44,89	46,89	46,89	50,89	48,53	0	48,69	50,89	
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				92,22	92,22	92,22	92,22	98,92	91,06	92,22	92,22	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				91	92	93	94	87,42	52,00	93	94	
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	0	100	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	95,63	70	100	100	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				88,24	88,24	88,24	94,12	99,64	100	88,24	94,12	

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Bantarbolang berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2021 IKM Kecamatan Bantarbolang sebesar 81,56 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Bantarbolang. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2021, cakupan layanan Kecamatan Bantarbolang tersebut mencapai 96,32% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Bantarbolang meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 1 kewenangan dari total 2 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 50%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 87,42% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 87,42%, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 95,63% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Bantarbolang. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola

pemerintahan baik baru tercapai 99,64% yaitu sebanyak 10 desa dari 17 desa di Kecamatan Bantarbolang. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Bantarbolang.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2021, Kecamatan Bantarbolang mendapat nilai SAKIP sebesar 48,53 (kategori C) dan IRB sebesar 11 (kategori C) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Bantarbolang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Bantarbolang untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bantarbolang yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
- c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
- f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
- g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Bantarbolang juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- e. Masih rendahnya kapasitas aparatatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan
- f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
- g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bantarbolang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan

potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pematang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pematang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pematang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pematang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pematang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pematang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “Pematang itu ngangeni”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

a. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

b. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

c. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Bantarbolang mendukung misi kedua yaitu "mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Bantarbolang mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah "**Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**" dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 adalah "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**", maka kebijakan pembangunan Kabupaten

Pemalang tahun 2023, diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur**", dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana.
- b. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul.
- c. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19.
- d. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI).
- e. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.
- f. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang tahun 2023, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Bantarbolang mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Bantarbolang adalah :

1. Dampak global dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan pendapatan mengakibatkan potensi menurunnya kinerja tahun 2023.
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 - Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
 - Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Bantarbolang.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan

- dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjangkaran masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
 3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
 4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Bantarbolang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang. Renja Kecamatan Bantarbolang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Bantarbolang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Bantarbolang.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN	Kecamatan Bantarbolang				KECAMATAN	Kecamatan Bantarbolang				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bantarbolang			3.380.226.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bantarbolang				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 dokumen	7.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 dokumen	9.135.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	2.445.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1.115.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 laporan	1.115.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	1.115.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun	14 dokumen	2.004.453.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun	14 dokumen	1.574.175.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	17 orang/1 bulan	2.000.774.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	17 orang/1 bulan	1.568.095.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD yang tersusun	11 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang tersusun	11 dokumen	3.400.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dokumen	679.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dokumen	680.000	
	Administrasi Barang	Kecamatan	Jumlah dokumen	2 dokumen	1.795.000	Administrasi Barang	Kecamatan	Jumlah dokumen	2 dokumen	1.795.000	

No	Rancangan Awal RKP					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bantarbolang	administrasi barang milik daerah yang tersusun			Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bantarbolang	administrasi barang milik daerah yang tersusun			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	1 dokumen	680.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	1 dokumen	680.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	20 orang	6.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	20 orang	38.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	35 stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	35 stel	28.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 orang/1 keg	3.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 orang/1 keg	5.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 orang/1 keg	3.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 orang/1 keg	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5 layanan	85.026.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5 layanan	351.930.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis/12 bulan	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis/12 bulan	7.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	4.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	4.526.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis/12 bulan	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis/12 bulan	250.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	3 jenis/12 bulan 29630 lembar	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	3 jenis/12 bulan 29630 lembar	15.815.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis surat kabar yang tersedia	1 jenis/12 bulan	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis surat kabar yang tersedia	1 jenis/12 bulan	3.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	2 kegiatan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	2 kegiatan	15.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang tertata	2 jenis	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang tertata	2 jenis	1.115.000	
	Pengadaan Barang	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah barang milik	18 unit	129.507.700	Pengadaan Barang	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah barang milik	18 unit	144.000.740	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bantarbolang	daerah yang tersedia			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bantarbolang	daerah yang tersedia			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1 unit	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	2 unit	81.020.740	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	3.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah mebel yang tersedia	10 unit	80.339.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah mebel yang tersedia	10 unit	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 unit	59.168.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	3 aktivitas	274.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	3 aktivitas	296.400.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 surat	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 surat	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rek/12 bln	16.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rek/12 bln	31.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	17 orang/12 bl	255.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	17 orang/12 bl	259.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	68 unit	160.465.535	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	68 unit	211.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	10 unit	57.461.535	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	10 unit	81.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah mebel yang terpelihara	20 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah mebel yang terpelihara	20 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	32 unit	5.360.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	32 unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 unit	82.644.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bantarbolang	Persentase pelayanan publik yang tersedia	70%	19.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bantarbolang	Persentase pelayanan publik yang tersedia	70%	83.530.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi	1 data	6.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi	1 data	10.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	1 data	6.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	1 data	10.200.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 kasus	8.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 kasus	14.800.000	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	35 peraturan	3.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	35 peraturan	5.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	10 layanan	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	10 layanan	5.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	4 kasus	2.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	4 kasus	4.800.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	1 unit	0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	1 unit	17.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara	1 unit	0	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara	1 unit	17.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	23 kewenangan	5.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	23 kewenangan	41.550.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	24.050.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	17 dokumen	2.750.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	17 dokumen	17.500.000	
			Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	800 surat				Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	800 surat		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bantarbolang	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	80%	83.230.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bantarbolang				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta Musrenbang	120 orang	37.200.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bantarbolang				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/ke lurahan	60 orang	2.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/ke lurahan	60 orang	5.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pembangunan di Desa					Pembangunan di Desa					
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	120 orang	12.121.600	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	120 orang	15.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	2.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	5.750.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	46.030.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	1 lembaga	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	1 lembaga	36.030.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	30 orang	2.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	30 orang	4.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bantarbolang	Persentase gangguan transtibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	80%	55.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bantarbolang				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pelatihan Lirimas	34 orang	40.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kecamatan Bantarbolang				

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Keterteraman dan Ketertiban Umum		yang meningkat kapasitasnya			Keterteraman dan Ketertiban Umum					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pelatihan Linmas	34 orang	4.180.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pelatihan Linmas	34 orang	15.520.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Perda dan Perbup yang dikordinasikan penegakkannya	5 peraturan	15.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bantarbolang				
	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	5 peraturan	2.500.000	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	5 peraturan	5.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bantarbolang	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	123.315.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bantarbolang				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	4 kapsus	123.315.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bantarbolang				
	Pembinaan	Kecamatan	Jumlah laporan	2 dokumen	5.000.000	Pembinaan	Kecamatan	Jumlah laporan	2 dokumen	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bantarbolang	kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bantarbolang	kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	50 orang	2.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	50 orang	5.000.000	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	4 kasus	2.500.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	4 kasus	4.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah unsur Forkompimcam yg berkoordinasi	3 unsur/12 kegiatan	3.235.865	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah unsur Forkompimcam yg berkoordinasi	3 unsur/12 kegiatan	18.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bantarbolang	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	58,82%	64.105.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bantarbolang				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	10 desa	64.105.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bantarbolang				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkadades	17 desa/7 kegiatan	2.850.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkadades	17 desa/7 kegiatan	14.625.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	17 desa/1 kegiatan	2.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	17 desa/1 kegiatan	5.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17 desa/1 kegiatan	2.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17 desa/1 kegiatan	5.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 desa/1 kegiatan	2.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 desa/1 kegiatan	5.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	85 orang/1 keg	2.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	85 orang/1 keg	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	10 surat	2.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	10 surat	5.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	17 desa/1 keg	2.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	17 desa/1 keg	5.110.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	17 desa/1 keg	2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	17 desa/1 keg	5.110.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	51 orang/1 keg	2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Bantarbolang	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	51 orang/1 keg	3.000.000	

1.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2023 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan jalan rabat beton (jalan penghubung desa Pabuaran Kec.Bantarbolang ke desa Parunggalih Kec.Bodeh)	Desa Pabuaran	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	450 m x 3 m x 0,15 m	1
2	Peningkatan jalan rabat beton (jalan penghubung desa Peguyangan dengan desa Lenggerong)	Desa Peguyangan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	250 m x 4 m x 0,15 m	2

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	a. Pembangunan jalan rabat beton (dusun Pedagung-dusun Gemanti) b. Pembuatan drainase	Desa Pedagung	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	a. 800 m x 1 m x 0,10 m b. 280 m x 0,40 m x 0,60 m	3
4	Pelatihan pembuatan hantaran pengantin	Desa Suru	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	20 orang	1
5	Pelatihan menjahit	Desa Sambeng dan Desa Gladang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	40 orang	2

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANTARBOLANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, dengan prioritas pembangunan 2023 pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19
4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bantarbolang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 adalah "**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bantarbolang tahun 2023, adalah "**Meningkatnya pelayanan kecamatan**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan *trantibum* tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.;

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	94,69

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2023, Kecamatan Bantarbolang merencanakan sebanyak 6 program, 16 kegiatan dan 59 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Bantarbolang dengan kebutuhan dana sebesar Rp 2.758.790.500 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN Bantarbolang

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2023. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Penggandaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan dan Perlu dik	Profilman Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Efektiva n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikasi (Rp.)		Sifat Ter Data	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
UNDIR KEWILAYAHAN													2.758.243.000		3.076.113.000			
KELAMITYAN													2.681.104.000		2.948.583.000			
PROGRAM PENUNJANG TERUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													2.681.104.000		2.948.583.000			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
P.01	01	2.01	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Rincian Akuntansi atau Perincian Kinerja Intisial Pemerintah	Jumlah dokumen perencanaan Perincian Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantarbolang, Desa Katuruhan	48,69 skor	3	Dokumen	3	laporan	1.500.000	Dana Transf er Umum Daerah Alokasi Umum	Nilai Rincian Akuntansi atau Perincian Kinerja Intisial Pemerintah	30,35 skor	2.300.000
P.01	01	2.01	02	Kemutakhiran dan Penyusunan Dokumen RKA-REKPD	Nilai Rincian Akuntansi atau Perincian Kinerja Intisial Pemerintah	Jumlah dokumen RKA-REKPD dan laporan hasil kerjanya	Perencanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantarbolang, Desa Katuruhan	48,69 skor	1	Dokumen	3	laporan	1.000.000	Dana Transf er Umum Daerah Alokasi Umum	Nilai Rincian Akuntansi atau Perincian Kinerja Intisial Pemerintah	30,35 skor	1.300.000
P.01	01	2.01	03	Kemutakhiran dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-REKPD	Nilai Rincian Akuntansi atau Perincian Kinerja Intisial Pemerintah	Jumlah dokumen perubahan RKA-REKPD dan laporan hasil kerjanya	Perencanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantarbolang, Desa Katuruhan	48,69 skor	1	Dokumen	3	laporan	1.000.000	Dana Transf er Umum Daerah Alokasi Umum	Nilai Rincian Akuntansi atau Perincian Kinerja Intisial Pemerintah	30,35 skor	1.300.000

7	01	01	3.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SDPD	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen DPA-SDPD dan laporan hasil koordinasi i penyusunan dan dokumen DPA-SDPD	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Klatihan	48,69 skor	1 Dokumen	3 laporan	1.000.000	Dinas Trans for Desa Akutab Desa	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	90,89 skor	1.000.000
7	01	01	3.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SDPD	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen perubahan DPA-SDPD dan laporan hasil koordinasi i penyusunan dan dokumen perubahan DPA-SDPD	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Kecamatan Klatihan	48,69 skor	1 Dokumen	3 laporan	1.000.000	Dinas Trans for Desa Akutab Desa	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	90,89 skor	1.000.000
7	01	01	3.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SDPD	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator kinerja realisasi kinerja SDPD dan laporan hasil koordinasi i penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SDPD	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan realisasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Klatihan	48,69 skor	4 Laporan	5 laporan	1.000.000	Dinas Trans for Desa Akutab Desa	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	90,89 skor	1.000.000
7	01	01	3.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan realisasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Klatihan	48,69 skor	3 Dokumen	3 laporan	1.000.000	Dinas Trans for Desa Akutab Desa	Nilai Sistem Akutab Desa Kinerja Instansi Pemerintah	90,89 skor	2.000.000
7	01	01	3.04		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.000.453.900				90,89 skor	2.000.774.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Caji dan Turjunan Air	Nilai	Jumlah	Jumlah	Kabupaten	48,69	17	100%	2.000.774.000	Dinas	Nilai	90,89	2.000.774.000

					Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	uang yang diserahkan dan ditanggung oleh ANN	laporan keuangan pemerintah daerah yang terwujud	Pemang. Keuangan Daerah Kabupaten Bantarbolang, Semarang	skor	uang/14 bulan			Transaksi Umum Daerah Kabupaten Bantarbolang		Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	skor		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi / penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Semarang	48,69 skor	1 Laporan	100%	1.999.750	Dana Transfer Umum Daerah Kabupaten Bantarbolang		Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	50,89 skor	2.900.000	
7	01	01	2.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	Nilai Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semester SKPD dan laporan koordinasi / penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semester SKPD	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Semarang	48,69 skor	11 Laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum Daerah Kabupaten Bantarbolang		Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	50,89 skor	1.900.000	
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Pragma Sistem Anggaran	Nilai Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	Jumlah laporan dan analisa pragma realisasi anggaran	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Semarang	48,69 skor	1 Dokumen	100%	675.000	Dana Transfer Umum Daerah Kabupaten Bantarbolang		Sistem Akuntansi Pajak Kinerjanya terhadap Pemerintah	50,89 skor	1.000.000	
7	01	01	2.03		Advisi/realisasi Berang Misk Daerah pada Prangki Daerah							1.730.000				3.000.000		
7	01	01	2.02	01	Penelitian/Perencanaan/Revisi/Realisasi Berang Misk Daerah SKPD	Indeks Efisiensi Kinerja	Jumlah rencana perbaikan berang miskin	Penelitian/realisasi/edukasi berang miskin daerah yang	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Semarang	13,72	1 Dokumen	100%	680.000	Dana Transfer Umum Daerah Kabupaten Bantarbolang		Indeks Efisiensi Kinerja	13,72	1.000.000

1	01	01	2.03	05	Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan retribusi di dari penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kabupaten Pematang Siantar, Kecamatan Bantarbolang, Semua Kelurahan	12,72	1 Laporan	100%	1.113.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72	2.000.000
1	01	01	2.05	02	Administrasi Kelengkapan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah paket kebijakan dinas beserta atribut kelengkapan	Penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kabupaten Pematang Siantar, Kecamatan Bantarbolang, Semua Kelurahan	12,72	36 Orang	100%	13.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72	13.800.000
1	01	01	2.08	19	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kabupaten Pematang Siantar, Kecamatan Bantarbolang, Semua Kelurahan	12,72	20 Orang	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72	4.000.000
1	01	01	2.08	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kabupaten Pematang Siantar, Kecamatan Bantarbolang, Semua Kelurahan	12,72	20 Orang	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72	4.000.000
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Penyusunan layanan administrasi umum	Kabupaten Pematang Siantar, Kecamatan Bantarbolang, Semua Kelurahan	12,72	3 Paket	100%	85.620.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72	220.220.000
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Kebutuhan Material Land/Pemasangan Bangunan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	Penyusunan layanan administrasi umum	Kabupaten Pematang Siantar, Kecamatan Bantarbolang, Semua Kelurahan	12,72	1 Paket	100%	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72	5.000.000

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Perbaikan Rumah Warga	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah paket perbaikan rumah warga yang disediakan	Perencanaan ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semas, Kalaruban	12,72	1 Paket	100%	4.526.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	12,72	5.886.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Perencanaan ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semas, Kalaruban	12,72	3 Paket	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	12,72	125.000.000
7	01	01	2.06	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan	Perencanaan ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semas, Kalaruban	12,72	1 Paket	100%	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	12,72	6.580.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perbaikan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen bahan baku dan peralihan perundang-undangan yang disediakan	Perencanaan ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semas, Kalaruban	12,72	1 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	12,72	4.080.000
7	01	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan BKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penyusunan laporan koordinasi dan kemitraan BKPD	Perencanaan ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semas, Kalaruban	12,72	1 Laporan	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	12,72	76.280.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penyulang, Groyok, Pompa, dan								194.507.700			211.439.000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kebutuhan Jasa Operasional atau Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau layanan yang disediakan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semas, Kalaruban	12,72	1 unit	100%	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	12,72	70.000.000
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Mobil	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah paket	Jumlah barang milik	Kabupaten Pemalang	12,72	10 Unit	100%	90.000.000	Dana Transfer	Indeks Reformasi Birokrasi	12,72	90.000.000

					si	metode	daerah	Kecamatan									
					Birokrasi	yang	yang	Bantarbolang,									
					di	diseleksi	tersebut	dan									
					Birokrasi	kan	daerah	tersebut									
7	01	01	2.07	06	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah unit pelayanan dan mesin layanan yang disediakan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kabupaten Pematang Rejang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kelurahan	12,72	3 Unit	100%	99.158.750	Dana Transfer Umum Daerah Abdi Ulu	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72		93.900.000
7	01	01	2.08									274.900.000					290.850.000
7	01	01	2.08	01	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan proyek dan jasa konsultansi	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kabupaten Pematang Rejang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kelurahan	12,72	1 Laporan	3 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum Daerah Abdi Ulu	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72		4.300.000
7	01	01	2.08	02	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penyediaan jasa konsultansi, suporter data ar dan index yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kabupaten Pematang Rejang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kelurahan	12,72	3 Laporan	3 Laporan	16.500.000	Dana Transfer Umum Daerah Abdi Ulu	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72		31.200.000
7	01	01	2.08	04	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kabupaten Pematang Rejang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kelurahan	12,72	3 Laporan	3 Laporan	205.000.000	Dana Transfer Umum Daerah Abdi Ulu	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72		203.000.000
7	01	01	2.09									120.133.000					170.130.000
7	01	01	3.09	02	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diparkir dan diparkir di Peridra	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Pematang Rejang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kelurahan	12,72	10 Unit	87 Unit	52.119.000	Dana Transfer Umum Daerah Abdi Ulu	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72		90.000.000
7	01	01	2.09	08	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah mobil	Jumlah barang milik	Kabupaten Pematang	12,72	20 Unit	87 Unit	8.000.000	Dana Transfer	Indeks Reformasi Birokrasi	13,72		6.000.000

																				Uraian							
F	01	02	2.00																							6.400.000	11.000.000
Penyediaan Uraian Perencanaan yang Tidak Dikembangkan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																											
F	01	02	2.00	01																						2.000.000	4.000.000
Penyediaan layanan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																											
F	01	02	2.02	02																						2.000.000	4.000.000
Fasilitas Pelayanan Pemukiman Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																											
F	01	02	2.30	03																						2.400.000	3.900.000
Penyediaan Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																											
F	01	02	2.00																							2.750.000	3.900.000
Pelaksanaan Uraian Perencanaan yang Ditanggung biaya Camat																											
F	01	02	2.04	02																						2.750.000	3.900.000
Pelaksanaan Uraian Perencanaan yang terkait dengan Kooperation																											
F	01	00																								11.000.000	20.000.000
PROGRAM PENGUNCIAN DAN KEMUNGKINAN																											
F	01	00	2.01																							17.500.000	33.500.000
Kegiatan Kegiatan Pembangunan Desa																											
F	01	00	2.01	01																						2.500.000	3.700.000
Penggiatan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan di Desa																											

Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023

7	01	03	2.01	02	Revisi/pelebaran Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Binaan di Wilayah Kerja Kecamatan	Perencanaan masyarakat di desa yang aktif	Jumlah penerima manfaat dikumpulkan di desa	Jumlah peserta Musrablong (Desa - Kecamatan)	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Sernon Kelurahan	100%	1 Dokumen	120 Orang	12.900.000	Dana Transfor UTM di Dana Alokasi UTM	Penyusunan laporan desa yang aktif	100%	13.900.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Perencanaan masyarakat di desa yang aktif	Jumlah laporan kegiatan di efektifitas kegiatan pemerintah di wilayah kecamatan	Jumlah peserta Musrablong (Desa - Kecamatan)	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Sernon Kelurahan	100%	1 Laporan	120 Orang	2.500.000	Dana Transfor UTM di Dana Alokasi UTM	Penyusunan laporan desa yang aktif	100%	3.000.000
7	01	03	2.02	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							2.000.000				3.000.000	
7	01	03	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Perencanaan masyarakat di desa yang aktif	Jumlah laporan kegiatan yang diorganisir oleh lembaga desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diorganisir yang diorganisir	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Sernon Kelurahan	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	2.000.000	Dana Transfor UTM di Dana Alokasi UTM	Penyusunan laporan desa yang aktif	100%	3.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTAMAN UMUM								6.000.000			16.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertaman Umum								4.180.000				12.000.000
7	01	04	2.01	01	Bimbingan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Testara Nasional Indonesia dan Instansi Lainnya di Wilayah Kecamatan	Perencanaan masyarakat di desa yang aktif	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Testara Nasional Indonesia dan Instansi Lainnya	Jumlah peserta pelatihan Lintas yang diselenggarakan	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Sernon Kelurahan	100%	1 Laporan	30 Orang	4.180.000	Dana Transfor UTM di Dana Alokasi UTM	Penyusunan laporan desa yang aktif	100%	12.000.000

Renja Kecamatan Bantarbolong Tahun 2023

					Tanggung jawab pemerintah dan perubahan struktur Negera Kesatuan Republik Indonesia												
7	01	05	2.01	02	Penilaian, Koordinasi dan Pemantauan (Historis, Statistik, Kuantitatif) Wawasan Kebangsaan dan Antarban Nasiona	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	Jumlah orang yang pemerintah nasional dan kecamatan di tingkat (Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan dan kecamatan)	Jumlah masyarakat yang pemerintah nasional dan kecamatan di tingkat (Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan dan kecamatan)	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semua Kelurahan	100%	50 Orang	130 Orang	2.000.000	Dana Transfer ke Daerah Aspek di Lini III	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	100%	3.000.000
7	01	05	2.01	03	Penyusunan Kemitraan Sosial Sesuai Kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	Jumlah laporan kegiatan yang dibahas di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	Jumlah masyarakat yang pemerintah nasional dan kecamatan di tingkat (Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan dan kecamatan)	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	130 Orang	2.500.000	Dana Transfer ke Daerah Aspek di Lini III	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	100%	3.000.000
7	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Tugas Pokok Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	Jumlah dukumen tugas di tingkat desa dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang pemerintah nasional dan kecamatan di tingkat (Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan dan kecamatan)	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	130 Orang	3.500.000	Dana Transfer ke Daerah Aspek di Lini III	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	100%	4.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN DESA								20.800.000				20.800.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Koordinasi dan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Pemerintahan Desa								20.800.000				20.800.000
7	01	06	2.01	01	Pelayanan Perencanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	Jumlah kegiatan yang di tingkat desa dan kecamatan	Jumlah desa yang di tingkat desa dan kecamatan	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolong, Semua Kelurahan	88,82%	17 Dokumen	17 Desa	2.600.000	Dana Transfer ke Daerah Aspek di Lini III	Perencanaan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan yang tersebut	88,82%	3.000.000

Renja Kecamatan Bantarbolong Tahun. 2023

No	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)								
7	01	06	2.01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam rangka subsektor atau pemertin tahun desa	Jumlah desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kluwahan	98,82%	17	Dokumen	17 Desa	2.500.000	Dana Transfer ke Desa Abdi Masyarakat	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	98,82%	3.300.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pengabdian Keungulan Desa dan Penyelenggaraan Aeri Desa	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Perencanaan yang dihasilkan dalam rangka Pengabdian Keungulan Desa dan Penyelenggaraan Aeri Desa	Jumlah desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kluwahan	98,82%	17	Dokumen	17 Desa	2.500.000	Dana Transfer ke Desa Abdi Masyarakat	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	98,82%	3.300.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Jumlah dokumen dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kluwahan	98,82%	17	Dokumen	17 Desa	2.500.000	Dana Transfer ke Desa Abdi Masyarakat	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	98,82%	3.300.000
7	01	06	2.01	07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggaraan Desa	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Jumlah dokumen dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan penyelenggaraan desa	Jumlah desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kluwahan	98,82%	1	Dokumen	17 Desa	2.500.000	Dana Transfer ke Desa Abdi Masyarakat	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	98,82%	3.300.000
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengendalian dan Pemberdayaan Perangkat Desa	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Jumlah dokumen dihasilkan dalam rangka pemberdayaan dan pemberdayaan perangkat desa	Jumlah desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kluwahan	98,82%	10	Dokumen	17 Desa	2.000.000	Dana Transfer ke Desa Abdi Masyarakat	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	98,82%	3.300.000
7	01	06	2.01	09	Fasilitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Jumlah dokumen dihasilkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	Jumlah desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Kluwahan	98,82%	17	Dokumen	17 Desa	2.000.000	Dana Transfer ke Desa Abdi Masyarakat	Perencanaan desa bertumbuh melalui pemertin tahun baik	98,82%	3.300.000

						depan									
F	01	06	2.01	13	Fasilitasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Perencanaan desa bertata kelola dengan partisipasi masyarakat	Jumlah desa bertata kelola dengan partisipasi masyarakat	17	Dekurten	17 Desa	2.000.000	Dana Desa	Perencanaan desa bertata kelola dengan partisipasi masyarakat	98,82%	1.000.000
F	01	06	2.01	15	Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perencanaan desa bertata kelola dengan partisipasi masyarakat	Jumlah desa bertata kelola dengan partisipasi masyarakat	1	Dekurten	17 Desa	2.000.000	Dana Desa	Perencanaan desa bertata kelola dengan partisipasi masyarakat	98,82%	1.000.000

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Bantarbolang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
2. Renja Kecamatan Bantarbolang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Bantarbolang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya,

diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023.



NIP. 19771230 199703 1 001